BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perdesaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional, dewasa ini mendapat sorotan yang amat tajam dari berbagai kalangan. Persoalan ini selain menyangkut sebagian besar (±75%) masyarakat Indonesiaberdiam di desa (BPS,2001), juga karena banyak masyarakat persoalan p embangunan yang belum mampu dipecahkan di tingkat desa. Misalnya masalah pengangguran, ketimpangan, kemiskinan kurang lebih 60% bertempat tinggal di desa.

Issu utama dalam pembangunan perdesaan adalah menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat (desa) yang senantiasa beriringan dengan masalah perangkap lain seperti kemiskinan. Chamber (1988) menyatakan bahwa ada keterkaitan antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkap lain seperti kemiskinan (*poverty*), kerentanan (*vulnerability*), keterangsingan (*isolation*) menjadi sumber ketidakberdayaan dalam pembangunan perdesaan. Menurut Cabb (2005) bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan beberapa faktor seperti: 1) Ketiadaan akses terhadap informasi, 2) ketiadaan dukungan financial, 3) pelatihan, 4) ja-minan politik dan 5) adanya ketegangan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembangunan perdesaan yang dijiwai semangat otonomi yang ditujukan guna menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi,kemandir ian dan kemampuan sangat relevan bagi pembangunan yang berorientasi pada

peningkatan kualitas sumberdaya manusia (Supritna, 2000). Konsepsi ini secara implisit sejalan arah kebijakan Nasional Pembangunan Perdesaan pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2004-2009 Bab5: Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasamauntuk memperkuat posisi tawar. Pada bagian lain dinyatakan: Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan peni ngkatan akses masyarakat pada informasi serta sumber-sumber daya pembangunan.

Peraturan pemerintah ini mengisyarakatan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat untuk mampu dan berkembang secara mandiri sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat perdesaan. Upaya ke arah itu, melalui pengembangan kelembagaan yang mampu berfungsi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.

Berbagai program bantuan pemerintah yang mengalir ke desa belum secara signifikan mengangkat harkat hidup masyarakat desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah urbanisasi, menyediakan lapangan kerja. Situasi yang terjadi adalah ketergantungan, konservatisme dan pragmatisme masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah (Eko, 2004). Kegagalan program pemerintah

disebabkan banyak hal, mulai dari stretegi dan pendekatan yang keliru sampai pada pengelolaan program yang salah urus.

Lemahnya keberdayaan masyarakat desa dalam melakukan perubahan ter-kait dengan kurangnya masyarakat desa memperoleh akses informasi terhadap sumber-sumber daya pembangunan sebagai konsekueansi adanya dinamika dan perubahan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mereka ketahui dan mereka jalan-kan. Oleh sebab itu, tidak heran, apabila timbul ketimpangan aktivitas dan dinamika lembaga desa. Adanya salah persepsi yang berakibat pada munculnya konflik-konflik sosial yang mengarah dalam mengadopsi nila-nilai baru dalam pem-bangunan.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan lembaga yakni Ke-pala Desa harus tanggap terhadap pesan-pesan pembangunan dan mampu menyampaikan pesan-pesan tersebut ke dalam bahasa atau lembaga yang kiranya dapat dipahami masyarakatnya. Belum efektifnya komunikasi yang dibangun berimplikasi pada tidak sedikit pesan-pesan pembangunan yang tidak sampai pada khalayak ramai (masyarakat).

Berdasarkan latar berlakang masalah, maka pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang yang merupakan wilayah penyangga (*hinterland*) Kota Medan sebagai ibukota dari Propinsi Sumatera Utara. Untuk itu penulis ingin melihat dan mengetahui bagaimana komunikasi pembangunan di setiap desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

B. Identifikasi Masalah

Komunikasi merupakan hal yang paling utama dalam mobilitas masyarakat. Kemajuan suatu lembaga masyarakat tergantung bagaimana perkembangan komunikasi di daerah tersebut.

Bila dicermati dari fenomena di atas, maka dapat dikemukakan problem statement yaitu bahwa". Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan melalui komunikasi, tegasnya bahwa pengembangan lembaga desa yang diidentifikasikan melalui komunikasi belum optimal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan perdesaan".

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian, maka masalah ini dibatasi pada "Komunikasi Dalam Pembangunan Perdesaan Di Kecamatan Percut Sei Tuan."Yang menitikberatkan pada perkembangan dan kemajuan fasilitas umum yang dilihat dari jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan kegiatan masyarakat.

D. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi dalam pembangunan perdesaan di Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana keadaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kecamatan Percut Sei Tuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan komunikasi dalam pembangunan perdesaan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Mengetahui keadaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi dan rumusan-rumusan pemikiran yang aktual, pragmatis bagi para pengambil keputusan (praktisi).
2. Kemudian bagi para peneliti, dapat dijadikan sumber informasi guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam kajian serupa dari variabel lain yang tidak teridentifikasikan sehingga serta dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Geografi.
3. Dari aspek teoritis, dapat memberi sumbangan terhadap pengembangan teori penyebaran informasi khususnya teori-teori pendekatan keruangan.
4. Melalui penelusuran berbagai teori yang berhubungan dengan pengembangan lembaga desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan, menguji dan menganalisis, kemudian membuat rekomendasi pragmatis berupa bahan informasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.